

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia adalah salah satu pasar modal yang berbentuk gabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dalam pengendalian pasar modal di BEI instansi pemerintah ikut serta dalam pengawasan pasar modal agar berjalan secara efektif dan efisien. Bursa Efek Indonesia membagi klasifikasi dari industri yang ada di Indonesia menjadi tiga yaitu penghasil bahan baku, manufaktur, dan jasa. Pada industri manufaktur terdapat sektor barang konsumsi (www.sahamok.com). Berikut ini adalah Tabel 1.1 yang menjelaskan jumlah dan klasifikasi subsektor yang terdapat pada industri barang konsumsi.

Tabel 1.1 Klasifikasi Sektor Barang Konsumsi

No	Subsektor	Jumlah
1.	Makanan dan Minuman	26
2.	Rokok	4
3.	Farmasi	12
4.	Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga	6
5.	Peralatan Rumah Tangga	4
6.	Industri Barang Konsumsi Lainnya	1
Jumlah		53

Sumber : www.sahamok.com

Indeks harga saham gabungan sektor barang konsumsi pada periode 2017 hingga 2019 diatas rata rata total dari seluruh industri, industri barang konsumsi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hal ini dibuktikan dengan harga saham dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Sektor barang konsumsi berada pada posisi kedua dengan kenaikan harga saham pada periode 2017 hingga 2019 tertinggi . Berikut ini adalah Gambar 1.1 terkait grafik IHSG pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.



Gambar 1.1 IHSI Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2019

Sumber : finance.yahoo.com

Menurut Gambar 1.1. sektor barang konsumsi unggul dari sektor lainnya pada awal tahun 2018 dengan perolehan tertinggi yaitu 2,76%. Perusahaan yang ikut berkontribusi dalam peningkatan harga saham pada tahun 2017 diantaranya PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) naik 5,26%, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik sebesar 1,78%, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) naik 3,88%, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik hingga 4,57%, dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga naik 3,64%. Indeks sektoral sesi perdagangan sektor barang konsumsi pada awal tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan indeks sektor barang konsumsi disebabkan oleh optimisme konsumen. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 122,1 sedangkan periode sebelumnya sektor konsumen memperoleh IKK sebesar 120,7 (www.bareksa.com).

Pada kuartal III IHSI sektor barang konsumsi mengalami penurunan yang drastis namun indeks sektor barang konsumsi kembali menguat 0,64 % pada penutupan pasar kuartal IV, hal ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSI)

menguat 0,72 % pada level 5.995 di akhir tahun 2019. Perusahaan yang mendorong peningkatan harga saham yaitu PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dengan kenaikan mencapai 1,32 %, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) naik 3,03 %, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik 0,54 %, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) naik 0,88 %, dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 0,45 % (www.cnbcindonesia.com).

IHSG memiliki fungsi yaitu memberikan informasi terkait kenaikan dan penurunan pasar investasi nasional yang dapat digunakan sebagai acuan para investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Kenaikan IHSG menunjukkan bahwa kondisi ekonomi suatu sektor mengalami kemajuan. Industri barang konsumsi masih menjadi sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2018, subsektor yang memberikan kontribusi yang tinggi pada industri manufaktur terhadap PDB Indonesia yaitu industri makanan dan minuman sebesar 6,33%, disusul dengan subsektor lainnya alat angkutan 3,8%, barang logam, komputer, barang elektronik, dan mesin 3,4%, kimia 2,6%, serta tekstil dan pakaian jadi tumbuh 1,5% (www.ekonomi.kompas.com).

Industri sektor barang konsumsi mengalami peningkatan IHSG sepanjang tahun 2017-2019 dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia khususnya pada subsektor makanan dan minuman dengan begitu peneliti menjadikan perusahaan sektor barang konsumsi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat kepercayaan pada penyajian informasi keuangan yang dinilai oleh auditor berupa opini. Tanggung jawab auditor terletak pada opini yang dikeluarkannya, sedangkan tanggung jawab manajemen adalah penyusunan serta penyajian laporan keuangan secara wajar dengan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (Kustiawan, 2016).

Laporan keuangan yang telah dipublikasikan ditujukan untuk sumber informasi bagi pemakai laporan keuangan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Diperlukan peran dari manajer, komisaris, serta pemegang saham

dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Rosyida & Subowo, 2016). Menurut Apandi & Tresnawati (2016) laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik adalah otentik, obyektif serta dapat dipercaya. Tingkat kepercayaan ditentukan oleh opini atau pendapat auditor. Perolehan opini yang paling baik adalah opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberi oleh auditor jika penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, serta tidak terdapat pada kondisi atau keadaan tertentu yang membutuhkan bahasa penjelas (Apandi & Tresnawati, 2016).

Hubungan keagenan adalah hubungan yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak *agent* dan pihak *principal* disebabkan oleh adanya wewenang dan tanggung jawab yang terikat (Jensen & Meckling, 1976). Girsang & Yuyetta (2016) mengungkapkan dengan terjalannya kontrak kerja maka pihak *agent* memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan *principal*, di sisi lain pihak *agent* juga tentunya memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Perbedaan tujuan membuat timbulnya konflik keagenan dimana pihak agen tidak bertindak sesuai keinginan pihak prinsipal. Pihak agen harus memenuhi kewajiban yaitu melakukan penyajian, pelaporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan perusahaan kepada pihak prinsipal (Girsang & Yuyetta, 2016).

Widyaningsih (2018) mengungkapkan bahwa bangkrutnya sebuah perusahaan banyak yang terkait oleh masalah degradasi moral pada kalangan pelaku bisnis, *corporate governance* yang lemah, dan kualitas laporan keuangan terpublikasi pada publik yang lemah. Masalah tentang kualitas laporan keuangan di Indonesia terjadi pada berbagai sektor di Indonesia salah satunya adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017 terdapat kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga melakukan penggelembungan atau manipulasi laporan keuangan. Presiden Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga sengaja menggelembungkan nilai piutang dari enam perusahaan yang bekerjasama dengan AISA. Hal itu terungkap dalam persidangan atas manajemen lama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai piutang erat kaitannya dengan penjualan AISA. Jika piutang atau tagihan dari perusahaan naik,

maka nilai penjualan seolah-olah juga mengalami kenaikan. Laporan keuangan yang lebih baik dapat meyakinkan pihak kreditur seperti bank untuk memberikan pinjaman hal ini juga berlaku dengan saham (AISA). Indikasi pelanggaran tersebut telah ditemukan OJK setelah melakukan analisa pada laporan keuangan AISA. Berdasarkan peraturan UU Pasar Modal tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap pihak yang sengaja menghilangkan, memalsukan atau menyembunyikan informasi sehingga berpotensi merugikan perusahaan merupakan bentuk pelanggaran pidana. Laporan keuangan AISA mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian namun ditemukan penggelembungan dana yang dilakukan manajemen lama. Hasil dari investigasi mengungkapkan terdapat *over statement* hingga Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada pos penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas bisnis makanan (www.cnbcindonesia.com). Perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) akhirnya menyajikan kembali laporan keuangan sepanjang tahun 2018, namun saham perusahaan AISA telah dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 *restated* dan laporan keuangan 2018 yang telah diaudit AISA mendapat opini *disclaimer* dua tahun berturut-turut (www.cnbcindonesia.com).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2018 yaitu perusahaan SNP *Finance* yang diawali dengan penjualan surat utang jangka menengah yang disebut dengan *MTN (Medium Term Notes)* dengan tujuan membuka keran pendanaan baru. Tidak lama kemudian MTN ini diperingkat oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) dengan didasari oleh laporan keuangan SNP *Finance*. Pada awalnya peringkat efek pada Desember 2015 – 2017 SNP *Finance* mendapat peringkat A-, lalu naik menjadi A pada Maret 2018. Namun tidak lama kemudian, pada bulan Mei 2018 ketika kasus mulai terkuak, perikat SNP *Finance* turun menjadi CCC dan pada bulan yang sama peringkatnya turun lagi menjadi *SD (Selective Default)*. Akhirnya SNP *Finance* dinyatakan gagal bayar dan juga melakukan pengajuan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebesar kurang lebih Rp 4,07 Trilyun dengan kredit perbankan 2,22 Trilyun dan MTN 1,85 Trilyun. SNP *Finance* telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hasil audit inilah yang digunakan perusahaan pembiayaan itu untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan utang jangka menengah atau *Medium Term Note (MTN)*, namun OJK menemukan bahwa SNP *Finance* terdeteksi telah menyajikan laporan

keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya karena menyebabkan kerugian banyak pihak. (www.cnnindonesia.com).

Fenomena-fenomena yang telah terjadi seperti kasus yang menimpa perusahaan sektor barang konsumsi menunjukkan bahwa opini audit belum mampu mewakili kualitas dari laporan keuangan. Dari beberapa fenomena di atas, kasus tersebut menunjukkan rendahnya pengawasan internal perusahaan dan auditor eksternal sehingga fungsi dari pihak tersebut belum bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari kasus kecurangan yang telah terjadi. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee*. Alasan peneliti memilih variabel komite audit karena pada perusahaan yang terkena kasus kecurangan laporan keuangan memiliki kemungkinan bahwa komite audit perusahaan tidak bekerja efektif dan efisien. Keberadaan komite audit ditujukan agar perusahaan dapat meningkatkan integritas serta transparansi laporan keuangan, komite audit berfungsi dalam menyalurkan informasi keuangan kepada dewan komisaris, kepemilikan institusional erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan karena kemampuan memonitor tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan (Rosyida & Subowo, 2016).

Komite audit pada umumnya terdiri dari tiga sampai lima. Komite audit juga berperan pada proses pengelolaan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan penerapan *good corporate governance*. Komite audit memiliki fungsi yaitu mengontrol proses pelaporan keuangan sehingga kredibilitas laporan keuangan baik (Sofia, 2018). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang kualitas laporan keuangan diantaranya Salehi & Shirazi (2016), Sofia (2018) dan Devi et al (2020). Pada penelitian Salehi & Shirazi (2016), Sofia (2018) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan keahlian akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemampuan akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh komite audit dapat meningkatkan pengawasan audit internal dan lebih menjadi lebih tepat fungsi sehingga mempengaruhi kualitas pelaporan dan pengungkapan keuangan sedangkan Devi et al (2020) mengungkapkan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Perusahaan memiliki tujuan yaitu mensejahterakan pemegang saham. Presentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat memberikan pengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangan, keberadaan investor institusional tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi pelaporan keuangan yang dapat melemahkan kualitas laporan keuangan (Savero,2017). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kualitas laporan diantaranya Rafika M (2018) dan Rosyida & Subowo (2016). Penelitian Rafika M (2018) dan Rosyida & Subowo (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi kualitas laporan keuangan sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh kualitas laporan keuangan. Pihak institusi dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengawasan, hal ini membuat manajemen meningkatkan kinerjanya untuk penyajian laporan keuangan yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Audit fee merupakan kewajiban berupa biaya yang dibayar perusahaan kepada kantor akuntan publik atas jasa pemeriksaan yang diberikan untuk mengaudit laporan laporan keuangan (Rachmawati, 2018). Besarnya *audit fee* yang didasari dengan kontrak yang disetujui oleh pihak auditor dan pihak *auditee*, dengan adanya kontrak tersebut maka kesepakatan dinyatakan resmi. Hasil penelitian Bhuiyan et al (2020) , Nehme et al (2018) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena semakin besar biaya audit yang dikeluarkan maka kualitas laporan keuangan semakin baik, namun penelitian (Hanmei & Shaowen, 2017) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *audit fee* dengan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil analisis yang didapati menyimpang yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembaruan informasi tentang **“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Audit Fee pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2017-2019”**.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan memiliki kewajiban dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Pada umumnya perusahaan yang sehat akan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian, dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian maka perusahaan telah memenuhi kelengkapan dalam penyajian, mengikuti standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, dan tidak terdapat ketidakpastian terkait kelangsungan usaha.

Kewajiban perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik tentunya membuat perusahaan berusaha untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian agar mendapat kepercayaan dari berbagai pihak. Munculnya kasus manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Perusahaan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik sehingga membuat kualitas laporan keuangan menjadi diragukan. Peneliti termotivasi untuk mengetahui lebih lanjut faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee*.

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan maka permasalahan terkait penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana komite audit, kepemilikan institusional dan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah komite audit, kepemilikan institusional dan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Komite audit terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 -2019?
 - b. Kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
 - c. *Audit fee* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017- 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee* berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Komite audit terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
 - b. Kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
 - c. *Audit fee* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang terdiri dari dua aspek yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Bagi Akademisi
Menjadi sumber informasi dan wawasan untuk pengembangan ilmu terkait pengaruh komite audit, kepemilikan institusional dan *audit fee* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh komite audit, kepemilikan institusional dan *audit fee* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan informasi pihak perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan informasi pihak investor sebagai pertimbangan para calon investor untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang berisi informasi tentang materi yang terkait. Berikut ini merupakan penjelasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian secara umum. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dengan teori agensi, *good corporate governance*, kualitas laporan keuangan, komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee* yang menjadi dasar penelitian. Pada ini juga membahas hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah pada penelitian, dan hipotesis penelitian yang menjadi dugaan sementara atas masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang: jenis penelitian, populasi dan sampel (untuk kuantitatif), pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data serta hasil analisis perhitungan statistik. Bab ini juga menjelaskan tentang data yang diteliti, pengujian hipotesis, dan pengaruh parsial dan simultan pada tiap variabel independen (komite audit, kepemilikan institusional, dan *audit fee*) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang diberikan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN